



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran

SOSIOLOGI SMA

Kelompok Kompetensi E

**Profesional :
Konflik Sosial**

**Pedagogik :
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



GURU PEMBELAJAR

MODUL

**Mata Pelajaran Sosiologi
Sekolah Menengah Atas (SMA)**

KELOMPOK KOMPETENSI E

**Profesional : Konflik Sosial
Pedagogik : Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan**

Penulis : Susvi Tantoro, S.Sos, M.A.

Dra. Sri Suntari, M.Si.

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**

Penulis :

Susvi Tantoro, S.Sos., M.A., 081232883033, densusvi@gmail.com
Dra. Hj. Sri Suntari, M.Si. 08123272297, sun_pppg@yahoo.com

Penelaah :

Dr. Sugeng Harianto, M.Si, 08123229551, harianto1964@yahoo.com
Drs. Nurhadi, M.Si. 08125236444, geometrimolekul@yahoo.co.id

Copyright © 2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu pengetahuan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting bagi kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi tersebut dibedakan menjadi 10 (sepuluh) peta kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui tatap muka, daring (*on line*), dan campuran (*blended*) tatap muka dengan daring.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP on line untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.

Baru, Januari 2016
Kepala PPPPTK PKn dan IPS

Drs. M. Manadjir, M.A
NIP. 195905241987031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Peta Kompetensi	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Saran Cara Penggunaan Modul	2
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1:	
Konflik Sosial (22 JP)	
A. Tujuan.....	3
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	3
C. Uraian Materi	3
D. Aktivitas Pembelajaran.....	35
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	35
F. Rangkuman.....	37
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	38
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2:	
Paradigma dalam Sosiologi (9 JP)	
A. Tujuan	39
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	39
C. Uraian Materi	39

D. Aktivitas Pembelajaran.....	44
E. Latihan/ Kasus/Tugas	44
F. Rangkuman	44
G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut.....	46

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3:

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (18 JP)

A. Tujuan	47
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	47
C. Uraian Materi	47
D. Aktivitas Pembelajaran.....	58
E. Latihan/ Kasus/Tugas	58
F. Rangkuman	59
G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut.....	61
H. Kunci Jawaban.....	61

Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas

Evaluasi

Penutup

Daftar Pustaka.....	64
----------------------------	-----------

Glosarium.....	64
-----------------------	-----------

Lampiran

DAFTAR TABEL

No.	Nama	Halaman
1.	Persyaratan Angka Kredit Minimal bagi Guru yang akan Naik Pangkat/Jabatan Sub Unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berdasarkan Golongan dan Jabatan.....	55

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Guru Pembelajar sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkannya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Program Guru Pembelajar akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan Program Guru Pembelajar baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk Program Guru Pembelajar dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan Program Guru Pembelajar dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK, salah satunya adalah di PPPPTK PKn dan IPS. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat.

Modul tersebut merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat Guru Pembelajar Sosiologi SMA. Modul ini berisi materi, metode, batasan-batasan, tugas dan latihan serta petunjuk cara penggunaannya yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Dasar hukum dari penulisan modul ini adalah :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.

B. Tujuan

- a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai Standar Kompetensi yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memenuhi kebutuhan guru dalam peningkatan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

C. Peta Kompetensi

Melalui modul Guru Pembelajar diharapkan peserta diklat dapat meningkatkan kompetensi tentang Masalah Konflik Sosial dan Kekerasan Sosial

D. Ruang Lingkup

1. Masalah Konflik Sosial
2. Kekerasan Sosial

E. Saran Cara Penggunaan Modul

1. Bacalah modul dengan seksama sehingga bisa dipahami
2. Kerjakan latihan tugas
3. Selesaikan kasus/permasalahan pada kegiatan belajar kemudian buatlah kesimpulan
4. Lakukan refleksi

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

KONFLIK SOSIAL

A. TUJUAN

Setelah mempelajari materi modul Masalah Konflik Sosial peserta diklat diharapkan mampu:

1. Membedakan konsep konflik sosial dengan benar
2. Menjelaskan bentuk-bentuk konflik dengan benar
3. Mengurai masalah konflik sebagai fenomena sosial dengan benar

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Indikator pencapaian kompetensi dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar konflik sosial
2. Menjelaskan teori konflik sosial
3. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial
4. Membedakan bentuk-bentuk konflik sosial
5. Menemutunjukkan alternatif pemecahan konflik sosial.

C. URAIAN MATERI

1. Latar Belakang

Di manapun keberadaannya, setiap manusia selalu terlibat interaksi dengan orang lain. Hal itu untuk mencukupi kebutuhannya. Agar semuanya berjalan teratur, maka masyarakat manusia memerlukan aturan-aturan guna mencapai tujuan bersama. Namun seiring perkembangan zaman, interaksi sosial yang berjalan teratur dapat berubah sehingga terjadi adanya konflik sosial.

Konflik sosial bisa dipicu oleh beberapa hal, antara lain adanya anggota masyarakat yang tidak paham dengan tujuan kelompok atau masyarakat. Misalnya seseorang yang sesekali berbicara dengan kata-kata 'kotor' diselingi umpatan, sedangkan di sekitarnya ada beberapa anak yang sedang memperhatikannya. Konflik juga dapat berlangsung karena norma-norma sosial yang ada tidak membantu anggota masyarakat mencapai

tujuan. Hal ini terlihat saat didengung-dengungkannya profesionalitas di lingkungan suatu organisasi. Pada saat anggotanya ada yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan seniorinya, dia tidak bisa menduduki kepengurusan, karena terbentur oleh aturan atau budaya yang ada di organisasi, dimana senior lebih diutamakan (budaya senioritas). Selain hal di atas masih banyak lagi penyebab konflik yang berkembang dalam masyarakat.

Konflik yang berlangsung dalam masyarakat dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Banyak contoh kasus yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, apalagi sejak adanya reformasi tahun 1998/1999, kebebasan berpendapat di depan umum mulai marak bahkan terkadang tidak terkontrol. Misalnya bentuk pertentangan dengan adanya demonstrasi yang berakhir dengan tindakan anarkhi, berupa perusakan pagar, melakukan pelemparan benda ke aparat atau gedung sampai ada yang rusak.

Konflik sosial memang tidak bisa hilang dalam masyarakat, namun apakah membiarkan terjadinya konflik berlangsung tanpa aturan dan ditunjukkan begitu saja tanpa kendali? Anggota masyarakat pasti tidak menghendakinya. Maka konflik perlu dikelola, dalam arti disalurkan melalui media yang tepat, misalnya dengan perundingan atau musyawarah, sehingga konflik tidak mengarah pada merusak barang orang lain atau melukai fisik orang lain.

Dalam kerangka itulah, setiap anggota masyarakat perlu mengetahui dan mempelajari apa itu konflik, apa penyebabnya, dan saluran apa yang dapat digunakan untuk meredam konflik. Sehingga anggota masyarakat paham bahwa konflik sebagai peristiwa yang biasa terjadi, tidak perlu dihindari dan konflik bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Maka sosialisasi tentang konflik sosial perlu diberikan melalui lembaga formal seperti sekolah-sekolah. Untuk tujuan tersebut, maka bahan ajar ini dibuat agar wawasan tentang konflik sosial lebih luas, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi konflik yang ada.

2. Konsep Dasar Konflik

Menurut Webster dalam Pruitt (2004:9), istilah "*conflict*" di dalam bahasa Inggris berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa pertentangan fisik antara beberapa pihak. Arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, gagasan, dan lain-lain". Sehingga istilah "konflik" juga menyentuh aspek psikologis di balik pertentangan fisik itu sendiri.

Pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan dengan pihak lain, misalnya dalam hal emosi, bentuk fisik, unsur kebudayaan, dan pola perilaku. Perbedaan-perbedaan itu akan semakin menajam manakala dipengaruhi oleh unsur psikologis dalam diri manusia. Unsur psikologis yang dimaksud dapat berupa perasaan amarah, benci yang menyebabkan dorongan-dorongan untuk saling menekan, saling menyerang, saling melukai dan bahkan saling menghancurkan individu atau kelompok yang dianggap sebagai lawan (Soekanto, 2002:98). Suatu pertentangan pada umumnya berkembang dari pertentangan nonfisik, berkadar rendah tanpa kekerasan (*non-violent*) menjadi benturan fisik, yang bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*).

Dalam kaitannya dengan pertentangan sebagai konflik, Gurr dalam Al Hakim (2003:3) membuat kriteria yang menandai suatu pertentangan sebagai konflik. *Pertama*, sebuah konflik harus melibatkan dua pihak atau lebih di dalamnya; *kedua*, pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi-aksi saling bermusuhan (*mutually opposing actions*); *ketiga*, mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan "musuh"; *keempat*, interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas, karena itu keberadaan peristiwa pertentangan dapat dideskripsikan dengan mudah oleh para pengamat sosial yang tidak terlibat dalam pertentangan.

Dalam kehidupan masyarakat, konflik juga dapat berupa proses instrumental yang mengarah pada pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial serta dapat menetapkan dan menjaga garis

batas antara dua atau lebih kelompok. Dengan konflik, suatu kelompok dapat memperkuat kembali identitas dan solidaritas di antara anggotanya.

3. Peta Teori Konflik

Sosiologi sebagai *a multiple paradigm science*, sebagaimana yang dinamakan oleh Ritzer (1992), mempunyai banyak teori dan paradigma. Ritzer membedakannya ke dalam (1) paradigma fakta sosial, yang melahirkan teori fungsionalisme struktural dan teori konflik; (2) paradigma definisi sosial yang melahirkan teori aksi, interaksionisme simbolik, dan fenomenologi; dan (3) paradigma pertukaran sosial, yang melahirkan teori sosiologi perilaku dan teori pertukaran.

Dari beberapa teori konflik yang dikenal dalam sosiologi, terdapat dua golongan yaitu *pertama*, teori konflik fungsional dan *kedua*, teori konflik kelas (Affandi, 2004:135). Kedua kelompok teori ini berakar pada pada pemikiran dua tokoh yaitu Georg Simmel dan Karl Marx. Pemikiran Simmel kemudian diikuti oleh Lewis Coser, sedangkan Marx diikuti oleh Ralf Dahrendorf.

Georg Simmel, seorang sosiolog fungsionalis Jerman, dalam karyanya yang berjudul "*Conflict and The Web of Group-Affiliations*", mencoba mendekati teori konflik dengan menunjukkan bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat mendasar, berkaitan dengan sikap bekerja sama dalam masyarakat. Simmel memandang konflik sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat karena konflik berfungsi untuk mengatasi ketegangan antara hal-hal yang bertentangan dan mencapai kedamaian. Oleh karena itu antagonisme atau sifat yang saling bertentangan adalah unsur dalam suatu kerjasama.

Lewis Coser melalui karyanya yang berjudul "*The Functions of Social Conflict*", mencoba menitikberatkan pada konsekuensi-konsekuensi terjadinya konflik pada sebuah sistem sosial secara keseluruhan. Teorinya menunjukkan bahwa adalah salah jika memandang konflik sebagai hal yang merusak sistem sosial, karena konflik juga dapat memberikan keuntungan pada masyarakat luas di mana konflik itu terjadi. Konflik justru membuka peluang bagi terciptanya integrasi antarkelompok, selain itu konflik juga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.

Karl Marx adalah salah seorang teoretisi konflik paling besar dan menjadi rujukan dalam setiap kali pembahasan mengenai konflik. Bangunan utama pemikiran Marx berdasarkan pra-anggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Dalam karyanya "*The Communist Manifesto*", disebutkan bahwa "sejarah semua masyarakat hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas". Marx mengkritik masyarakat kapitalis dan membaginya dalam dua pembagian kelas, yaitu kelas atas atau kelas yang berkuasa atau pemilik modal (*bourgeois*) dan kelas bawah atau kelas buruh (*proletar*). Kelas atas menguasai produksi sedangkan kelas bawah tunduk terhadap kekuasaan kelas atas. Dalam pandangan Marx, negara secara hakiki dikuasai oleh kelas atas yaitu kelas yang menguasai ekonomi. Perspektif negara kelas dapat menjelaskan mengapa yang menjadi korban pembangunan adalah rakyat kecil. Negara dianggap merupakan negara kelas yang mendukung kepentingan kelas-kelas penindas. Negara memungkinkan kelas atas untuk memperjuangkan kepentingan khusus mereka menjadi "kepentingan umum".

Selain Coser, Ralf Dahrendorf merupakan salah satu teoretisi konflik modern yang sangat terkenal. Melalui karyanya "*Class and Class Conflict in Industrial Society*", Dahrendorf mengajak kembali pada reorientasi sosiologi yang mengarah pada problem-problem perubahan, konflik dan tekanan dalam struktur sosial, khususnya yang menyangkut permasalahan totalitas masyarakat. Meskipun pandangan Dahrendorf banyak dilhami oleh pemikiran Marx, namun teorinya sangat berbeda dengan teori Marx, karena ia menganalisis konflik tanpa memperhitungkan politik ekonomi yang ada, apakah kapitalisme atau sosialisme. Jika Marx bersandar pada kepemilikan alat produksi, maka Dahrendorf bersandar pada kontrol atas alat produksi. Dalam terminologi Dahrendorf, pada masa post-kapitalisme, kepemilikan alat produksi baik sosialis maupun kapitalis, tidak menjamin adanya kontrol atas alat produksi (Johnson, 1990:183). Oleh karena itu di luar Marxisme, ia mengembangkan beberapa terminologi dari Max Weber, antara lain bahwa sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif melalui otoritas atau kekuasaan. Teori sosial Dahrendorf ini berfokus pada kelompok kepentingan konflik yang berkenaan dengan kepemimpinan,

ideologi, dan komunikasi, di samping berusaha melakukan berbagai usaha untuk menstrukturkan konflik itu sendiri, mulai dari proses terjadinya hingga intensitasnya dan kaitannya dengan kekerasan. Dalam hal ini Dahrendorf ingin menunjukkan bahwa kepentingan kelas bawah menantang legitimasi struktur otoritas yang ada.

Menurut penganut teori konflik, kesatuan masyarakat yang berdasarkan integrasi dan kesanggupan orang untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan struktur-struktur yang ada dan memainkan peranan-peranan mereka sebagaimana mestinya hanyalah sebuah penampakan belaka. Masyarakat hanya nampaknya berintegrasi dan bersepakat tentang nilai-nilai dasar. Pada hakikatnya, masyarakat terbagi dalam kubu-kubu yang saling berlawanan. Teori konflik tidak bertolak dari masalah “Apakah yang mempersatukan masyarakat?”, tetapi dari “Apakah yang mendorong dan menggerakkan masyarakat?”. Bukan nilai-nilai bersama yang diutamakan, tetapi kepentingan-kepentingan, persaingan, siasat adu domba, dan sebagainya. Teori konflik menyatakan bahwa adanya kelangkaan terhadap sesuatu yang berharga, misalnya kekuasaan, wewenang, dan barang-barang yang menghasilkan kenikmatan telah memunculkan golongan atau kelompok oposisi, yaitu kelompok yang dirugikan atau porsi lebih besar lagi, atau kelompok yang mencegah pihak lain menguasai barang yang langka itu.

Menurut Veeger (1997:93), penalaran teori konflik adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan orang-orang di dalam kelompok atau masyarakat tidaklah sama karena ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang tergantung.
2. Perbedaan dalam kedudukan menimbulkan kepentingan yang berbeda pula. Satu pihak ingin meraih kedudukan, di pihak lain ingin mempertahankannya.
3. Mula-mula sebagian dari kepentingan yang berbeda itu tidak disadari yang disebut dengan “kepentingan tersembunyi” (*latent interest*) yang tidak akan meletuskan suatu aksi. Tetapi apabila kepentingan tersembunyi itu terus-menerus tertekan bahkan tertindas, maka akan berubah menjadi *manifest interest*, sehingga benturan antara dua pihak, yang berkuasa dan yang dikuasai pun tak terelakkan.

4. Konflik akan berhasil membawa perubahan dalam struktur-struktur relasi sosial.

Melihat dari beberapa pandangan mengenai teori konflik di atas, teori konflik pada umumnya berdasar pada asumsi dasar bahwa masyarakat atau organisasi berfungsi sedemikian rupa di mana individu dan kelompoknya berjuang untuk memaksimalkan keuntungan; secara tidak langsung dan tidak mungkin dihindari adalah perubahan sosial yang besar seperti revolusi dan perubahan tatanan politik.

Ringkasnya ada sedikitnya empat hal yang penting dalam memahami teori konflik sosial, antara lain:

- a. Kompetisi atas kelangkaan sumber daya, seperti benda-benda ekonomi.
- b. Ketidaksamaan struktural, baik dalam hal kekuasaan maupun perolehan yang ada dalam struktur sosial.
- c. Individu dan kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan dan berjuang untuk mencapai revolusi.
- d. Perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari konflik antara keinginan yang saling berkompetisi.

4. Akar Konflik

Setelah mengetahui teori konflik, maka setidaknya ada tiga pilar utama yang harus mendapat perhatian (Affandi, 2004: 80), yaitu: *pertama*, watak psikologis manusia yang merupakan dasar sentimen dan ide yang membangun hubungan sosial di antara berbagai kelompok manusia (keluarga, suku, dan lainnya); *kedua*, adalah fenomena politik, yaitu berhubungan dengan perjuangan memperebutkan kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan imperium, dinasti, maupun negara; *ketiga*, fenomena ekonomi, yaitu fenomena yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat maupun negara.

1. Watak Psikologis Manusia

Menurut Plato dalam Siahaan (1986:57), manusia memiliki tiga sifat tingkatan dalam dirinya, yaitu nafsu atau perasaan (*the appetities or the senses*), semangat atau kehendak (*the spirit or the will*), dan kecerdasan atau akal (*intelligence, reason, and judgement*). Ketiga potensi di atas apabila mampu dikelola dengan baik, maka manusia akan mampu mengembangkan eksistensinya sebagai manusia secara baik pula. Namun sebaliknya, di balik ketiga sifat di atas, manusia juga memiliki sifat binatang (*animal rationale*) yang bisa memunculkan perasaan yang berlebihan yang bisa mendorong untuk bertindak agresif.

Berikut ini sebagian sifat dasar yang dimiliki manusia :

a) Cinta terhadap kelompok

Manusia secara fitrah telah dianugerahi rasa cinta terhadap garis keturunan dan golongannya. Rasa cinta ini menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan serta harga diri kelompok, kesetiaan, kerja sama, dan saling membantu dalam menghadapi musibah atau ancaman yang pada akhirnya akan membentuk kesatuan dan persatuan kelompok.

Cinta merupakan sebuah subjek meditasi filosofis yang berkaitan dengan masalah-masalah etis (Affandi, 2004:82). Cinta dalam hal ini merupakan salah satu dorongan manusia yang paling kuat, awalnya dilihat sebagai kebutuhan akan kontrol, terutama ketika manusia sebagai *animal rationale* mampu menggunakan kemampuan rasionalnya. Ketika manusia hidup bersama-sama dalam suatu kelompok, maka fitrah ini mendorong terbentuknya rasa cinta maupun solidaritas terhadap kelompok. Manusia tidak akan rela jika salah satu anggota kelompoknya terhina dan dengan segala daya upaya akan membela dan mengembalikan kehormatan kelompoknya.

Sebagai sebuah fitrah, maka rasa cinta terhadap kelompok ini terdapat pada sebuah bentuk masyarakat, baik dalam masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat modern. Perbedaannya hanya pada faktor pengikat. Dalam masyarakat sederhana, faktor

pengikatnya adalah ikatan darah atau keturunan. Sedangkan dalam masyarakat modern, ikatan didasarkan atas kepentingan anggota-anggota kelompok.

b) Agresif

Manusia memiliki watak agresif sebagai akibat adanya *animal power* dalam dirinya yang mendorong untuk melakukan kekerasan. Agresifitas manusia ini dapat berakibat terjadinya permusuhan, pertumpahan darah, bahkan pemusnahan umat manusia itu sendiri.

Beberapa tokoh seperti Konrad Lorenz (biologi), Sigmund Freud (psikologi), dan Thomas Hobbes (sosiologi) berpendapat bahwa agresifitas selalu melingkupi diri manusia (Mul Khan, 2002:25-27). Lorenz mengemukakan bahwa sebagaimana hewan, manusia mempunyai instink agresif yang menyatu dalam struktur genetiknya. Freud juga melontarkan pandangan bahwa manusia adalah makhluk rendah yang dipenuhi oleh kekerasan, kebencian, dan agresi. Kalau kemudian konflik itu tidak terjadi lebih disebabkan oleh superego yang mengekang dorongan-dorongan agresifnya. Demikian halnya dengan Hobbes, ia mengungkapkan bahwa dalam keadaan alamiah, keadaan manusia didasarkan pada keinginan-keinginan yang mekanis, sehingga manusia selalu berkelahi. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa bukanlah perbedaan-perbedaan dalam diri manusia yang menyebabkan terjadinya agresi, melainkan watak agresiflah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam setiap kelompok manusia.

Fromm (2000:390) tidak menyangkal adanya potensi agresif dalam diri manusia, tetapi menurutnya tindakan agresif-destruktif tersebut muncul karena adanya kondisi eksternal yang ikut menstimulir, seperti masalah politik, kemiskinan, dan sebagainya. Fromm juga melihat narsisme (paham kecintaan terhadap diri sendiri) sebagai salah satu sumber utama agresifitas manusia. Suatu kelompok atau bangsa yang narsistik akan bereaksi dengan penuh amarah dan bersikap agresif ketika ada kelompok yang melecehkan simbol narsisme mereka. Bahkan untuk itu mereka bersedia

mendukung kebijakan perang yang dikeluarkan oleh pemimpin mereka.

2. Fenomena Politik

Dalam membahas fenomena politik yang berhubungan erat dengan konflik tentunya tidak lepas dari pembahasan mengenai kekuasaan. Pembahasan mengenai hal ini menjadi sangat penting mengingat peran yang semestinya dilakukan oleh seorang pemimpin diharapkan mampu menjadi penengah dan pemisah diantara kelompok-kelompok yang berbeda.

Kekuasaan erat kaitannya dengan kepemimpinan atau pemerintahan. Kekuasaan pada hakikatnya adalah sebuah otoritas untuk mengambil keputusan (Affandi, 2004: 94). Kepemimpinan lahir dari dua faktor yang saling terkait, yaitu *pertama*, faktor personal, dan *kedua*, solidaritas sosial atau dukungan kelompok. Secara personal, seseorang yang akan menjadi pemimpin harus memiliki sifat terpuji dan adil untuk dijadikan panutan dan pengayoman bagi rakyat, serta mampu melaksanakan hukum yang ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan solidaritas atau dukungan dari rakyat mutlak diperlukan karena tanpa hal itu maka kekuasaannya akan jatuh.

Kekuasaan negara adalah puncak kekuasaan dalam kehidupan bersama umat manusia. Karenanya, pertarungan akan sering terjadi antar kelompok dalam memperebutkan kekuasaan tersebut. Sedangkan cara-cara atau strategi yang dipakai untuk meraihnya terkadang menggunakan cara yang kotor dan penuh intrik.

Pemimpin atau penguasa tidak serta-merta menjadi pemimpin yang berlaku adil. Keinginan untuk mengikuti hawa nafsu dan ambisi pribadi terkadang menjadi penyebab timbulnya penindasan, teror, dan anarkhi. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan dan kebijakan politik tertentu.

Seorang pemimpin yang telah berkuasa akan menjalankan kekuasaannya dengan cara yang berbeda-beda. Ibn Khaldun dalam Affandi (2004:99) membedakan pola menjalankan kuasa dalam tiga

bentuk: (1) kekuasaan dijalankan dengan lemah lembut dan penuh keadilan. Ciri dalam masyarakat ini adalah setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi serta dapat mengemukakan pendapat secara bebas tanpa rasa takut dan tertekan; (2) kekuasaan yang dijalankan dengan dominasi, kekerasan, dan teror. Masyarakat di bawah kepemimpinan ini akan hidup dalam tekanan dan rasa takut. Tidak ada kebebasan menyalurkan aspirasi. Kecenderungannya, rakyat menjadi apatis; (3) kekuasaan dijalankan dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman. Masyarakat di bawah kekuasaan ini akan mudah menyimpan dendam bahkan mudah bergolak manakala keputusan yang dikeluarkan penguasa tidak mencerminkan rasa keadilan.

Tipe-tipe kekuasaan di atas dapat menjadi tolok ukur keadaan suatu masyarakat, apakah kondisi masyarakat dalam keadaan aman dan tertib tidak ada gejolak, atau masyarakat dalam kondisi konflik yang kacau balau. Namun selain faktor kepemimpinan, karakteristik dan tingkat kedewasaan masyarakat juga sangat mendukung dalam tegaknya sebuah negara.

3. Fenomena Ekonomi

Dalam teori-teori sosial modern yang membahas konflik, tidak satu pun yang melepaskan perhatiannya dari fenomena ekonomi. Perbedaannya hanya terjadi pada apakah faktor ekonomi menjadi determinan yang menyebabkan konflik atau tidak. Teori konflik yang berakar dari Marx dan Dahrendorf akan selalu memandang bahwa konflik disebabkan oleh masalah distribusi dan perebutan sumber-sumber ekonomi.

Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi bahkan menentukan situasi dan perkembangan politik. Perekonomian yang stabil adalah faktor penting dalam mencapai kestabilan politik. Fenomena ekonomi dan fenomena politik ibarat dua sisi mata uang. Yang menjadi masalah adalah ketika proses kolaborasi antara penguasa politik (pemerintah) dengan penguasa ekonomi (pengusaha) menjadi tidak sehat dan tidak berpihak kepada masyarakat.

Banyak kasus kerusuhan terjadi salah satu penyebabnya adalah ulah permainan para elit politik dan pengusaha dalam menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketika pertumbuhan dijadikan jargon dalam pembangunan ekonomi, maka perhatian kebijakan pun mengarah ke sana. Akibatnya pemerintah merupakan sumber dana utama bagi pengusaha di setiap level pemerintahan karena banyak memberikan proyek pembangunan sarana dan prasarana fisik. Kondisi yang demikian sudah pasti rentan dengan masalah kolusi dan korupsi.

Pola penguasa yang turut menjadi pengusaha serta jalinan erat yang menciptakan simbiosis mutualistik antara penguasa dengan pengusaha sangatlah sulit untuk dilawan rakyat kecil. Kebijakan yang diskriminatif ini dapat mengakibatkan dendam yang berkepanjangan dan ketika suasana berubah drastis dan memungkinkan, maka akumulasi kekecewaan ini dilampiaskan dengan melakukan perusakan terhadap simbol-simbol kesewenang-wenangan dan penyebab kesenjangan.

Akar dari konflik menurut Leopold von Wiise (Soekanto, 2002:99) dapat disebabkan oleh adanya:

1. Perbedaan pendirian dan perasaan.
2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat pula menyebabkan terjadinya konflik antarkelompok manusia.
3. Perbedaan kepentingan. Bentuk kepentingan dapat berupa kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan ini menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya, misalnya mengenai reorganisasi sistem nilai. Sebagaimana diketahui perubahan sosial mengakibatkan terjadinya disorganisasi pada struktur.

Loekman Soetrisno (2003:13-19) mengungkapkan bahwa faktor penyebab konflik adalah:

- a. Kondisi masyarakat yang multietnis dan multibudaya; kondisi yang demikian ini menyebabkan terjadinya banyak perbedaan, baik mengenai budaya, cara pandang, nilai, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan inilah yang sering menimbulkan pertentangan dalam kehidupan sosial.
- b. Kecemburuan sosial; faktor ini erat hubungannya dengan masalah ekonomi dan rasa keadilan. Kecemburuan bisa terjadi manakala suatu kelompok merasa diperlakukan tidak adil, baik oleh penguasa atau oleh kelompok lainnya.
- c. Penggunaan kekuasaan yang berlebihan
Sudah menjadi kewajiban pemerintah yang berkuasa untuk melindungi rakyatnya, di sisi lain demi kebaikan bersama pemerintah berhak melakukan penertiban agar tercipta suatu keteraturan sosial. Namun cara-cara yang digunakan pemerintah seringkali dianggap sebagai tindakan berlebihan. Tindakan pemaksaan (*koersif*) dan sikap represif dari aparat kerap kali menimbulkan kesan yang buruk bahkan sifat dendam di mata masyarakat.

Menyimak dari pembahasan di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab konflik sosial paling tidak ada tiga faktor: *Pertama*, sifat agresif seseorang atau suatu kelompok dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang pluralistik; *kedua*, faktor ekonomi; berkaitan dengan masalah kemiskinan, kesenjangan, dan perebutan sumber dan bahan pangan; dan *ketiga*, faktor politik; berkaitan dengan tuntutan rasa keadilan akibat perlakuan dari pihak penguasa atau pemerintah.

5. Bentuk-bentuk Konflik

1. Berdasarkan Sifatnya

Para sosiolog membedakan dua jenis konflik yang masing-masing memiliki sebab yang berbeda dalam pemunculannya, yaitu konflik yang bersifat destruktif dan fungsional (Soetrisno, 2003:14).

a. Konflik destruktif

Konflik destruktif adalah konflik yang mengakibatkan benturan fisik yang membawa kerugian jiwa dan harta. Konflik ini muncul karena rasa benci satu kelompok terhadap kelompok lain. Kebencian itu disebabkan karena berbagai hal seperti adanya kesenjangan ekonomi, fanatisme terhadap suatu golongan dan sebagainya.

Contoh konflik destruktif adalah konflik antara etnis Dayak dan Melayu dengan etnis Madura di Sampit yang dipicu oleh rasa kebencian akibat kecemburuan sosial, juga terjadinya kerusuhan pada bulan Mei 1998 yaitu konflik antara para demonstran dan aparat keamanan yang berujung pada perusakan dan penjarahan.

b. Konflik fungsional

Konflik fungsional adalah konflik yang menghasilkan perubahan atau konsensus baru yang bermuara pada perbaikan. Konflik jenis ini berasal dari perbedaan pendapat antara dua kelompok tentang suatu masalah yang sama-sama mereka hadapi. Misalnya, kasus perbedaan pendapat dalam penentuan hari raya, perbedaan konsep dalam membuat kurikulum, dan sebagainya. Perdebatan antara para ilmuwan dalam rangka mencari kebenaran itu tentunya sangat keras tetapi tidak berkembang menjadi sebuah konflik yang destruktif, seperti terjadinya perkelahian, perusakan, maupun pembakaran, atau kemudian tidak saling tegur antara satu dengan yang lain.

Hasil dari konflik fungsional ini adalah suatu konsensus atau kesepakatan bersama terhadap hal-hal yang menjadi sumber munculnya perbedaan pendapat.

2. Berdasarkan Arahnya

Berdasarkan model arahnya, konflik dapat digolongkan menjadi dua yaitu, konflik horisontal dan konflik vertikal (Sihbudi dan Nurhasim, 2001:vii). Model konflik yang pertama, yaitu konflik horisontal adalah konflik yang terjadi intra masyarakat. Faktor pemicu terjadinya konflik jenis ini bisa disebabkan oleh masalah yang berkaitan dengan primordialisme, atau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Kasus konflik di Sambas Kalimantan Barat, perusakan toko-toko milik

warga keturunan Tionghoa, konflik antar pendukung partai politik adalah sebagian contoh dari jenis konflik ini. Bahkan sering juga terdengar lewat media massa konflik antar suporter olahraga, antar mahasiswa, antar pelajar, bahkan antarwarga desa yang kadang tidak jelas apa pendorongnya.

Lemahnya penegakan hukum dapat juga mengakibatkan terabaikannya rasa keadilan yang pada akhirnya memunculkan kekecewaan yang kemudian dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menggunakan hukum sendiri (main hakim sendiri) dengan melakukan tindakan anarkis. Contoh kasus yang banyak terjadi di masyarakat adalah tindakan main hakim sendiri atau pengadilan massa terhadap seseorang atau kelompok pelaku tindak kriminal.

Sementara jenis kedua yaitu konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan penguasa atau negara. Konflik biasanya ditandai oleh kekecewaan dan kemarahan massa terhadap kebijakan pemerintah dan sikap aparat negara yang dianggap telah berlaku tidak adil. Beberapa kasus yang banyak terjadi seperti demonstrasi massa, demonstrasi mahasiswa, pengusuran dan penertiban kawasan kumuh, bahkan bisa juga sampai pada gerakan perlawanan terhadap negara, misalnya perlawanan GSA (Gerakan Separatis Aceh), OPM (Organisasi Papua Merdeka), dan RMS (Republik Maluku Selatan).

3. Berdasarkan Akar Permasalahannya

Berdasarkan akar permasalahannya, konflik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Konflik Agama

Salah satu faktor utama pemicu konflik di masyarakat atau hubungan antar bangsa adalah masalah agama atau prinsip keagamaan. Sesuai fakta, agama menjadi pemicu konflik telah tercatat dalam sejarah dunia. Pada dasarnya semua agama sebagai sebuah ajaran sekaligus tuntunan bagi pemeluknya yang menghubungkan antara dirinya dengan Tuhan dan sesamanya. Namun agama seringkali menjadi dasar munculnya konflik dari jaman ke jaman. Konflik agama sebagai konflik klasik yang sulit diselesaikan

karena berhubungan dengan doktrin yang sakral atau disakralkan oleh penganutnya.

Keyakinan terhadap doktrin agama tersebut berdampak pada sentimen antar agama. Seringkali agama dijadikan alasan pembenar oleh suatu kelompok untuk menyerang atau memusuhi kelompok lain. Contoh dari permasalahan di atas antara lain adanya Perang Salib yang terjadi beberapa fase antara bangsa Eropa Barat yang beragama Nasrani dengan bangsa Arab yang memeluk Islam. Konflik di Irlandia Utara muncul disebabkan terjadi disharmoni antara umat Kristen dengan Katholik. Lahirnya negara Pakistan sebagai manifestasi konflik agama antara Islam dan Hindu di India. Bahkan konflik klasik antara dua negara yang berlarut-larut sampai sekarang tetap menjadi potensi utama konflik antara India-Pakistan adalah mengenai masalah "Khasmir", sebuah wilayah yang secara geografis bagian dari India namun secara ideologi keagamaan menjadi bagian Pakistan.

Sampai saat ini, konflik di Timur Tengah juga didominasi oleh masalah agama atau alasan keagamaan yaitu antara bangsa Yahudi dengan bangsa Arab. Meskipun masalah konflik Palestina-Israel disebabkan perebutan wilayah atau negara namun perbedaan agama sangat berperan dalam permasalahan tersebut. Sementara itu, juga muncul konflik seagama yang disebabkan paham atau penafsiran yang berbeda dalam agama. Contohnya antara penganut Suni dan Syiah di Timur Tengah yang sering berakibat pada pertumpahan darah.

Dalam sejarah Indonesia, konflik dengan tendensi agama atau aliran keagamaan bukan merupakan hal yang baru. Pada tahun 1950-an terjadi pemberontakan DI/TII yang bertujuan mendirikan Negara Islam. Gerakan ini menimbulkan konflik antara pemerintah sebagai penguasa dengan para pemberontak sehingga mengganggu stabilitas nasional sampai gerakan ini dapat ditumpas pada tahun 1960-an.

Di antara paham atau aliran keagamaan yang dianggap sering menimbulkan konflik adalah paham fundamentalisme. Agama-agama besar yang ada di dunia seperti Islam, Kristen, Hindu dan lainnya pada umumnya terdapat kelompok yang menganut aliran radikal tersebut. Fundamentalisme pada umumnya muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan modern yang bersifat internal dan eksternal untuk menghadapi hegemoni budaya dan legitimasi politik serta penolakannya secara radikal terhadap sekulerisme. Fundamentalisme juga sebagai gerakan *purification* atau pemurnian terhadap ajaran agama serta penerapan ajaran agama yang dilaksanakan secara kaku bahkan cenderung menggunakan kekerasan.

Meskipun dalam peristiwa-peristiwa di atas, agama memiliki peran vital namun peran agama dalam masing-masing peristiwa berbeda-beda. Dalam peristiwa Perang Salib dan konflik di Irlandia Utara, peran agama sebagai penyebab konflik sangat dominan. Perbedaan doktrin agama berkembang pada perasaan sentimen antarumat masing-masing agama menjadi sebab utama dari munculnya konflik tersebut. Dalam peristiwa tersebut, agama telah berubah dari suatu paham spiritual menjadi paham spiritual yang dibalut dengan identitas yang eksklusif dari sebuah komunitas yang membedakannya dengan komunitas lain (Soetrisno, 2003:34). Sementara itu, dalam kasus peristiwa pemberontakan DI/TII atau terpisahnya Pakistan dari India, agama dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk membangun solidaritas dan dukungan bagi penganut agama Islam untuk mencapai tujuan politiknya.

Agama merupakan sarana yang efektif untuk memobilisasi massa. Namun keefektifan agama sebagai penyebab suatu konflik tergantung pada kondisi yang dialami sebuah masyarakat. Jika masyarakat mengalami ketidakberdayaan ekonomi dan politik maka agama akan mudah menjadi wahana mobilisasi guna mencapai tujuan. Sebaliknya, hal itu sulit dilakukan apabila masyarakat

mempunyai basis ekonomi yang kuat sehingga masyarakat sejahtera lebih bersikap menjaga situasi.

b) Konflik Ideologi

Istilah “Ideologi” diciptakan oleh filsuf Perancis, Antoine Destuutt de Tracy (1754-1836), seorang bangsawan yang bersimpati pada Revolusi Perancis tahun 1789. De Tracy adalah pengikut rasional, sebagai gerakan pembaharu yang kritis terhadap otoritas tradisional dan *mistifikasi* ajaran agama. Menurutnya, “Ideologi” sebagai ilmu tentang pemikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar menuju masa depan (Eatwell, 2004:5). Pada akhirnya istilah “Ideologi” pada perkembangannya bermakna negatif yang utamanya digunakan untuk mengelompokkan ide-ide yang bias atau ekstrem. Ideologi berperan bagi individu atau kelompok masyarakat karena mempunyai ragam efek termasuk perilaku dan kebijakan yang mengilhami dan membatasi.

Ideologi sebagai sebuah produk pemikiran sosial dapat digunakan sebagai alat pendorong sekumpulan manusia untuk mencapai cita-citanya. Namun sering kali “ideologi” ditafsirkan sebagai sesuatu yang negatif karena mengandung unsur kefanatikan buta. Ideologi pada umumnya dihubungkan dengan masalah politik di masyarakat atau negara. Perbedaan ideologi tak jarang menjadi potensi awal munculnya konflik. Kekuatan atas kefanatikan terhadap ide akhirnya melahirkan pemikiran dan tindakan radikal dalam masyarakat. Ideologi-ideologi yang secara universal dikenal antara lain komunisme, nasionalisme, kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, demokrasi, feodalisme, militerisme, totalitarisme, dan lain-lain. Pada tingkat yang bersifat ideologis, konflik terwujud di dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut serta menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial.

Paham nasionalisme Asia-Afrika, muncul sebagai akibat dari imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa. Antara nasionalisme

Asia-Afrika dengan imperialisme sebagai sesuatu yang berbeda tujuan bahkan bertentangan sehingga dalam mengaplikasikan paham masing-masing terjadi benturan kepentingan yang berujung pada konflik. Terjadinya perlawanan atau pemberontakan di negara-negara terjajah pasca Perang Dunia II, sebagai konflik kepentingan yang didasarkan pada konflik ideologi tersebut.

Sementara itu, komunisme yang identik dengan pandangan Karl Marx meninggalkan warisan yang ambigu sehingga menjadi sumber konflik diantara para pewaris ideologinya. Pada hakikatnya, komunisme mengecam paham lain seperti kapitalisme yang dianggap telah menghancurkan ikatan dan kesetiaan organik (Eatwell, 2004:141). Meski perbedaan paham antara komunisme dan kapitalisme dimulai pada pasca Revolusi Industri di Inggris sebagai pertentangan antara kepentingan kaum buruh dengan pemilik modal namun konflik tersebut berlanjut sepanjang jaman. Munculnya Perang Dingin pada tahun 1950-an sampai bubaranya Uni Soviet antara Blok Barat dan Timur juga disebabkan perbedaan ideologi tersebut.

Dalam perjalanan politik suatu pemerintahan juga sering muncul konflik antara kelompok Militer dan Partai Komunis. Meski keduanya punya insting melakukan *violence political* namun secara substansif latar belakang keduanya berbeda dalam mewujudkan naluri politiknya. Terdapat pola-pola tertentu yang umumnya terdapat di kalangan militer di suatu negara yaitu penekanan pada nasionalisme, apolitik praktis dan *esprit de corps*. Secara universal fungsi formal militer sebatas alat pertahanan negara sehingga di negara yang mengedepankan supremasi sipil, golongan militer di bawah kendalinya. Namun secara faktual kecenderungan tersebut bertolak belakang bagi negara tertentu yang punya sejarah pemerintahan dan latar belakang politik sehingga muncul supremasi militer. Di negara-negara yang baru berkembang seperti di Asia, dan Afrika perlu adanya kekuasaan diktator militer untuk menyelamatkan diri dari bahaya Komunisme (Lev, 1967:188-189).

Sementara itu, paham demokrasi yang menekankan pada persamaan individu atau kelompok dalam masalah sosial-politik bertolak belakang dengan paham politik lain seperti feodalisme yang bersifat konservatif ataupun paham totalitarisme yang menerapkan otoriter dalam kebijakannya. Secara historis, lahirnya paham-paham kebebasan dan persamaan di Eropa yang akhirnya berlaku universal seperti demokrasi dan liberalisme sebagai reaksi dominasi kaum feodal yang mempunyai hak istimewa atau *privilege*. Demokrasi juga menimbulkan tarik menarik dengan kediktatoran sebagai konflik antara pemerintahan berdasarkan suara rakyat dengan sistem tirani.

Konflik ideologi ini juga berpotensi terhadap perpecahan suatu bangsa atau negara seperti yang terjadi pada Jerman dan Korea pada pasca Perang Dunia II. Perbedaan ideologi para tokoh bangsanya serta dukungan dari masing-masing negara yang mempunyai kesamaan ideologi politik berakibat Jerman menjadi dua yaitu Jerman Barat yang beraliran liberalis yang didukung negara-negara Eropa Barat dan Amerika serta Jerman Timur berpaham komunis yang didukung Uni Soviet. Pada saat Uni Soviet bubar seiring dengan jatuhnya pengaruh komunis di dunia, maka antara Jerman Barat dan Timur dapat disatukan lagi dengan dasar atau asas liberalis. Sementara itu, Korea dipecah menjadi dua yaitu Korea Selatan berpaham Liberalis dan Korea Utara berpandangan komunis. Namun sampai sekarang antara kedua Korea masih terpisah bahkan kecenderungan muncul ketegangan-ketegangan sampai saat ini disebabkan perbedaan ideologi tersebut.

Perjuangan menegakkan suatu ideologi sering menggunakan cara-cara revolusi sehingga menimbulkan konflik terhadap kelompok lain. Sebagai contohnya adalah munculnya Revolusi Rusia ketika Raja Tsar Nicolas II dijatuhkan sebagai akumulasi dari perang ideologi antara feodalisme dan komunisme di Rusia. Peristiwa revolusi juga terjadi di Indonesia, ketika PKI pada tahun 1965 melakukan gerakannya. Konflik tersebut juga mengakibatkan terbunuhnya ribuan nyawa manusia.

c) Konflik Politik

Konflik politik sebagai sesuatu yang menarik untuk dibahas karena permasalahan ini sebagai hal yang paling kompleks di antara jenis-jenis konflik yang ada. Dalam konflik politik ini mencakup hampir semua aspek yang ada seperti kepentingan ekonomi, sosial, ideologi, agama, dan lingkungan hidup. Pada tingkat yang bersifat politik, konflik terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas di dalam masyarakat. Dalam situasi konflik, pihak yang berselisih berusaha mengabadikan diri dengan cara memeperkokoh solidaritas ke dalam di antara sesama anggotanya, membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama.

d) Konflik Ekonomi

Perubahan-perubahan besar dalam sejarah peradaban umat manusia, terutama setelah munculnya jaman *renaissance* di Eropa, selalu menunjukkan pengaruh faktor ekonomi. Karenanya, berbagai peristiwa besar yang menggerakkan manusia dalam jumlah besar tidak pernah lepas dari persoalan kepentingan ekonomi. Imperialisme dan kolonialisme dari bangsa-bangsa Eropa faktor pendorong utamanya adalah alasan ekonomi. Revolusi diberbagai negara juga tidak terlepas dari masalah ekonomi. Dengan realitas masyarakat yang demikian maka wajar jika lahir pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa sejarah peradaban umat manusia adalah sejarah perjuangan kelas dalam memperebutkan sumber-sumber produksi atau ekonomi.

Terjadinya konflik di masyarakat disebabkan oleh dampak dari struktur sosial yang tidak seimbang, di mana kelompok pemilik modal melakukan eksploitasi terhadap kelompok kelas bawah (kelas pekerja). Kondisi sosial yang tidak seimbang ini, terus bertahan karena pada dasarnya kelas pemilik modal mampu mempertahankan dukungan dari kebijakan negara yang telah dikuasainya.

Pemikiran Marx telah mengilhami pengikut-pengikutnya (Marxist dan Neo-Marxist) untuk menjelaskan konflik dan berbagai peristiwa besar lainnya dalam perspektif perebutan sumber-sumber ekonomi. Pemikiran tersebut menghasilkan ideologi gerakan dan menjadi pemicu revolusi diberbagai negara di awal abad XX (Affandi, 2004:200).

Menurut Ibnu Khaldun, faktor ekonomi lebih dominan sebagai pemicu munculnya konflik dibanding faktor lainnya (Affandi, 2004:200). Di antaranya adalah *pertama*, munculnya pemberontakan-pemberontakan atau perlawanan terhadap pemerintahan yang sah sering terjadi akibat adanya indikasi pemerintahan yang korup dan perampasan terhadap hak rakyat; *kedua*, terjadinya krisis perekonomian di mana pengeluaran negara lebih besar daripada devisa negara. Kondisi tersebut antara lain disebabkan pola kehidupan pada kemewahan. Di sisi lain terjadi ketimpangan sosial di mana rakyat hidup dalam kemiskinan bahkan kelaparan. Akumulasi kekecewaan rakyat akan menimbulkan gerakan perubahan bahkan revolusi. Selain itu, institusi keamanan negara seperti kepolisian dan militer yang lemah juga menjadi pemicu terjadinya peristiwa di atas.

Dengan demikian dapat disimpulkan, sebuah pemberontakan atau perlawanan terjadi karena kegagalan penguasa politik dalam mengelola sumber-sumber ekonomi. Sebaliknya, apabila seorang penguasa politik mampu menangani persoalan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, maka kekuasaan akan bertahan lebih lama dan konflik dapat diminimalisir.

Sementara itu, konflik ekonomi di masyarakat tidak terbatas pada pemerintah dan rakyatnya. Pada masa modern sekarang ini, sering terjadi konflik disebabkan masalah ekonomi antara negara. Meskipun konflik antar negara tersebut juga muncul pada masa lalu akibat persaingan dalam perdagangan. Persaingan perekonomian atau perdagangan antar negara pada masa sekarang pada umumnya tidak secara langsung menjadi pemicu konflik namun yang terjadi

adanya ketegangan-ketegangan atau memburuknya hubungan antar negara yang bersangkutan.

e) Konflik SARA

Sebagai gejala sosial, konflik akan selalu muncul pada setiap masyarakat karena antagonisme atau perbedaan yang menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat. Perbedaan-perbedaan sosial tidak mungkin dihindari karena adanya kelompok lapisan atas disebabkan terdapatnya fakta adanya lapisan bawah.

Konflik antarkelompok sering kali timbul karena adanya sejarah persaingan, prasangka dan rasa benci yang dilatarbelakangi oleh sesuatu yang bersifat pribadi, politis, etnis, ideologis dan lainnya. Konflik antar kelompok ditentukan oleh bangunan nilai dan penggunaan simbol yang berbeda antar kelompok tersebut sehingga menimbulkan penafsiran dan rasa yang berbeda untuk dihargai dan menghargai. Nilai-nilai kebudayaan dapat menjiwai kepribadian, sehingga mempengaruhi struktur kebutuhan yang selanjutnya dapat menentukan kehendak kelompok atau seseorang menerapkan peran sosialnya. Konflik yang disebabkan masalah SARA terutama suku dan ras, pada umumnya selalu terkait dengan faktor-faktor struktural yang ada dalam masyarakat. Di Indonesia sampai saat ini sering muncul konflik dengan latar belakang SARA

Struktur masyarakat Indonesia, ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horisontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan agama, suku-bangsa, adat-istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, adat dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat yang majemuk, suatu istilah yang diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda.

Pierre L. van den Berghe menyebutkan beberapa karakteristik sebagai sifat dasar masyarakat majemuk, yaitu (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering memiliki sub-kebudayaan yang berbeda dengan lainnya; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer; (3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik diantara kelompok satu dengan lainnya; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya (Nasikun, 2004:41).

Masyarakat majemuk seringkali menimbulkan gesekan antara masyarakat yang berbeda sehingga muncul konflik atau kerusuhan yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Faktor-faktor terjadinya kerusuhan sosial yang disebabkan SARA adalah:

1. Dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik suatu daerah mempunyai potensi bagi terjadinya ketegangan sosial atau konflik.
2. Perimbangan kekuatan-kekuatan sosial seperti suku, agama, ras dan antargolongan yang hampir sama merupakan akar utama penyebab terjadinya kerusuhan.
3. Daerah dengan perimbangan antara penduduk asli dan pendatang yang timpang dilihat dari penguasaan aset ekonomi maupun politik, akan berpotensi munculnya konflik SARA
4. Pola pemukiman penduduk yang heterogen atau multietnik dapat menjadi sumber konflik.
5. Adanya faktor-faktor akselerator (pemicu) terjadinya konflik.

Peristiwa konflik yang disebabkan masalah SARA di Indonesia seperti kasus di Ambon, Sambas, Kupang dan beberapa tempat di Indonesia merupakan wujud konkret dari konflik horisontal yang sampai sekarang masih sulit untuk dicegah. Hubungan sosial dan politik pada masa lalu yang diwadahi oleh konsep SARA menimbulkan dampak negatif bagi harmonisasi hubungan sosial dalam masyarakat

sekarang ini. Konflik SARA sudah meluas dari konflik stigma pribumi-nonpribumi namun sudah pada transisi gejala perubahan masalah sosial yang lebih kompleks menjadi konflik yang berdimensi agama, suku, ras dan antar golongan.

f) Konflik Sumber Daya Alam

Dalam beberapa tahun terakhir ini fenomena konflik sumber daya alam mencuat ke permukaan secara terbuka. Konflik itu tidak hanya terjadi dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tergolong “tidak dapat diperbaharui” (*non-renewable resources*) seperti minyak dan mineral, tetapi juga yang tergolong “dapat diperbaharui” (*renewable resources*). Konflik sumber daya alam yang selama ini terjadi telah menimbulkan kerusakan fisik, merugikan materi dan menyisakan tuntutan yang tidak mudah dipenuhi, seperti permintaan agar kawasan eksploitasi sumber daya alam dikembalikan kepada masyarakat (Usman, 2004:1). Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sering dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kalau tuntutan semacam itu diabaikan, maka akan dapat mengobarkan permusuhan, membangkitkan separatisme, dan disintegrasi, tetapi sebaliknya kalau hal itu dipenuhi bila mengganggu kegiatan eksploitasi sumber daya alam itu sendiri.

Konflik sumber daya alam dapat berupa bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis di antara struktur sosial yang berkembang di daerah sumber daya alam, yang terdiri dari masyarakat lokal, pemerintah, dan pengusaha atau investor. Hubungan yang tidak harmonis itu diawali ketika pemerintah melakukan monopoli dan manipulasi proses eksploitasi sumber daya alam, sehingga terjadi perbedaan akses. Perbedaan akses itu membuat pemerintah dan pengusaha atau investor dapat menikmati hasil terlalu banyak, sementara masyarakat terabaikan.

Konflik muncul ke permukaan ketika ketidakpuasan dan semangat berjuang memperbaiki nasib secara kolektif, dan konflik itu menjadi

semakin keras ketika ketidakpuasan dan semangat semacam itu bertemu secara simultan dengan akumulasi perasaan dan kesadaran bahwa telah terjadi penindasan dalam masyarakat. Misalnya, kasus konflik PT Freeport dengan penduduk sekitar di Papua, PT Caltex di Riau, dan sebagainya.

Selain itu konflik juga dapat terjadi secara horisontal yaitu antara warga masyarakat. Masalah yang terjadi biasanya karena perebutan lahan atau klaim atas suatu daerah, maupun pelanggaran terhadap batas-batas daerah yang telah disepakati bersama yang menjadi lahan eksploitasi sumber daya alam. Sebagai contoh adalah kasus konflik antara nelayan Madura, nelayan Sidoarjo, dan nelayan Pasuruan di Jawa Timur.

g) Konflik Lingkungan Hidup

Salah satu aset yang lazim ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan adalah modal alam (*nature resources*). Akumulasi aset ini ditambah dengan modal fisik bangunan, modal manusia, dan modal sosial sangat menentukan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Thomas Vinod (Usman, 2004:21), modal alam mencakup fungsi sumber, misalnya hutan, perikanan, pertambangan; dan fungsi penampung, misalnya udara dan air terutama sebagai media penerima polusi.

Upaya melindungi fungsi sumber sangat diperlukan karena memiliki kontribusi yang berharga bagi kehidupan masyarakat. Kerusakan fungsi sumber tentu saja akan menjadi malapetaka bagi kehidupan. Lingkungan yang tak terkontrol bukan saja berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga akan mengganggu pelbagai macam aktivitas sosial.

Dalam dua dasa warsa terakhir ini dengan dalih memacu pertumbuhan ekonomi, di Indonesia telah terjadi proses industrialisasi yang cukup pesat. Bersamaan dengan itu terjadi pula eksploitasi sumber daya alam yang cukup besar, terutama pada sektor

kehutanan, perairan, dan pertambangan. Proses industrialisasi dan eksploitasi tersebut telah menimbulkan persoalan degradasi lingkungan yang serius, misalnya terjadinya penggundulan hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, polusi udara, pencemaran sungai dan laut, penurunan kualitas tanah, dan sebagainya. Aliran-aliran beracun yang berasal dari pabrik, misalnya di beberapa daerah telah menciptakan pencemaran. Polusi udara akibat dari kegiatan industri bukan hanya menciptakan bau yang tak sedap, tempat pemukiman tidak nyaman, tetapi juga menimbulkan gangguan pernapasan.

Konflik sosial yang terkait dengan masalah lingkungan hidup ini bisa terjadi antara masyarakat dengan pihak industri (pengusaha atau pabrik), maupun di antara anggota masyarakat itu sendiri. Konflik sosial dalam konteks ini dapat dikonsepsikan sebagai hubungan sosial yang tidak harmonis sebagai konsekuensi dari perbedaan nilai, kepentingan dan tindakan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan. Berbagai kasus yang berkaitan dengan konflik lingkungan hidup ini diantaranya adalah polusi kabut asap yang terjadi di Kalimantan dan sebagian wilayah Sumatera akibat kebakaran hutan atau akibat “pembakaran” hutan berkaitan dengan pengelolaan hutan yang salah. Polusi kabut asap ini tidak saja menimbulkan gangguan penyakit saluran pernapasan tetapi juga mengganggu lalu lintas dan sejumlah jadwal penerbangan. Kasus pencemaran Teluk Buyat di Minahasa yang diduga tercemar limbah merkuri sehingga menyebabkan terjangkitnya penyakit minamata bagi penduduk sekitar teluk. Kasus pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di daerah Bojong Jawa Barat yang sempat diprotes warga karena dikhawatirkan menimbulkan polusi udara dan sumber penyakit. Kasus protes para warga yang tinggal di daerah sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) milik PLN, dan berbagai macam kasus lain yang terjadi baik dalam skala besar maupun kecil.

Konflik sosial yang terkait dengan masalah degradasi lingkungan ini memiliki sifat positif dan negatif (Usman, 2004:23).

Konflik dapat bersifat positif manakala menjadi bagian dari proses pengelolaan lingkungan yang tidak berjalan secara efektif dan efisien, dengan kata lain konflik dapat diperlukan untuk meluruskan ketentuan yang pernah disepakati atau menjelaskan kembali kesalahpahaman yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan konflik dapat bersifat negatif apabila semakin mempersulit jalinan kerjasama dalam proses pengelolaan lingkungan. Konflik menjadi semakin meresahkan ketika tidak melahirkan alternatif solusi, karena boleh jadi mereka yang terlibat konflik mengembangkan prinsip lebih baik sama-sama tidak menikmati daripada harus memberi kemenangan terhadap salah satu pihak.

6. Alternatif Penanganan Konflik

Para penganut pendekatan konflik dengan penuh keyakinan menganggap bahwa konflik merupakan gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat. Karena itu konflik tidak mungkin dilenyapkan. Konflik hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dapat terjadi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Konflik tidak perlu dicari dan tak perlu dihindari apabila konflik itu terjadi. Menghindar dari konflik akan membuka kesempatan untuk terjadinya frustrasi di kalangan masyarakat yang kemudian pecah menjadi suatu konflik yang destruktif. Konflik yang bersifat destruktif inilah yang harus dihindari.

Bagaimana mencegah terjadinya konflik destruktif? Melalui pendekatan budaya, Loekman Soetrisno (2003:18) mengemukakan empat cara pencegahan; *pertama*, mengembangkan sikap tenggang rasa atau "tepo seliro". Artinya, apabila tidak mau disakiti orang lain, jangan pula menyakiti orang lain; *kedua*, bersikap demokratis. Dalam artian seseorang harus mampu menghargai pluralisme pendapat, paham, budaya, dan suku bangsa yang beragam dalam masyarakat; *ketiga*, mengembangkan sikap toleransi beragama, tanpa harus keluar dari akidah agama masing-masing; *keempat*, bersikap sportif, yakni mau mengakui dan menerima kekalahan dalam berargumentasi atau dalam persaingan apabila memang argumentasi lawan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Setiap orang harus dapat memahami konflik dan memberikan perhatian tersendiri untuk dapat menetapkan cara yang tepat, bagaimana konflik dapat dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perpecahan antar manusia dan disintegrasi bangsa.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan konflik tersebut, Hodge dan Anthony dalam Al Hakim (2003:9) memberikan gambaran melalui berbagai metode penyelesaian konflik (*conflict resolution methods*).

Pertama, dengan metode paksaan (*coercion*). Setiap individu menggunakan kekuasaan dan kewenangan agar konflik dapat diredam atau dipadamkan. Namun sebenarnya cara ini kurang baik untuk dilakukan, karena bisa jadi konflik malah akan terus berlanjut dan orang akan kehilangan kewibawaan bahkan kekuasaan di mata orang lain yang terlibat konflik karena dianggap kurang adil dalam menyelesaikan pertikaian atau dianggap memihak salah satu individu atau kelompok yang terlibat konflik.

Kedua, penyelesaian konflik dengan metode penghalusan (*smoothing*). Pihak-pihak yang berkonflik hendaknya saling memahami konflik dengan menggunakan “bahasa cinta” untuk memecahkan dan memulihkan hubungan yang bersifat perdamaian. Membiasakan bersikap dan mengembangkan kehidupan yang penuh dengan suasana kekeluargaan dirasakan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan konflik. Melalui metode ini, dimungkinkan dapat dilakukan cara-cara kompromis dalam menyelesaikan konflik.

Ketiga, penyelesaian konflik dengan cara demokratis, artinya memberikan peluang kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan pendapat dan memberikan keyakinan akan kebenaran pendapatnya sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan cara ini, masing-masing pihak dapat saling membangun sebuah keterbukaan, dengan cara saling memahami potensi masing-masing. Misalnya dengan cara memperhatikan aspek kultural yang menggambarkan aspirasi, cita-cita, serta ideologi mereka.

Strategi pemecahan konflik yang efektif hendaknya juga perlu untuk dikaji secara matang. Cribbin dalam Al Hakim (2003:10) mengelaborasi strategi penanganan konflik mulai dari yang paling tidak efektif sampai dengan yang paling efektif:

1. Paksaan
Strategi ini umumnya tidak disukai banyak orang. Dengan paksaan mungkin konflik dapat diselesaikan dengan cepat, tetapi bisa menimbulkan reaksi kemarahan atau reaksi negatif lainnya.
2. Penundaan
Strategi ini dapat menyebabkan konflik semakin berlarut-larut.
3. Bujukan
Strategi ini berdampak psikologis, di mana orang akan kebal dengan berbagai macam bujukan sehingga perselisihan akan semakin tajam.
4. Koalisi
Koalisi merupakan suatu bentuk persekutuan untuk mengendalikan konflik. Akan tetapi strategi ini dapat memaksa orang untuk memihak, yang pada gilirannya bisa menambah kadar konflik menjadi semakin “memanas”
5. Tawar-menawar distribusi
Strategi ini sering tidak menyelesaikan masalah karena masing-masing pihak sering melepaskan beberapa hal penting yang menjadi haknya, dan jika terjadi konflik berarti masing-masing pihak merasa menjadi “korban” konflik.
6. Konsistensi damai
Strategi ini mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan “peraturan” yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen.
7. Perantara (mediasi)
Jika penyelesaian konflik menemui jalan buntu, masing-masing pihak dapat menunjuk pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil, serta tidak memihak.
8. Tujuan sekutu besar
Strategi ini melibatkan pihak-pihak yang berkonflik ke arah tujuan yang lebih besar dan kompleks, misalnya dengan cara membangun sebuah kesadaran nasional yang lebih luas dan mantap.
9. Tawar menawar integratif (*bargaining*)
Merupakan strategi untuk menggiring pihak-pihak yang bertikai untuk lebih berkonsentrasi pada kepentingan yang lebih luas, yang tidak

hanya berorientasi pada kepentingan sempit, misalnya kepentingan individu, kelompok, golongan, atau suku bangsa tertentu.

Selain itu Nasikun (2004:27-31) mengidentifikasi berbagai bentuk pengendalian konflik sosial, yaitu dengan mengadakan konsiliasi (*conciliation*), mediasi (*mediation*), dan arbitrase atau perwasitan (*arbitration*).

Pengendalian dalam bentuk konsiliasi dapat terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Pada umumnya mengambil contoh di dalam kehidupan politik, misalnya lembaga-lembaga yang bersifat parlementer (sidang pleno, sidang paripurna, dan sebagai berikut), dimana wakil-wakil dari kelompok parlemen (fraksi-fraksi di DPR) saling bertemu untuk mewujudkan pertentangan dengan cara damai. Dalam pada itu, agar lembaga-lembaga itu dapat berfungsi secara efektif, setidaknya harus memenuhi empat hal berikut:

1. Bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luarnya.
2. Kedudukan lembaga dalam masyarakat bersifat monopolistik, dalam arti hanya lembaga-lembaga itulah yang berfungsi demikian.
3. Peranan lembaga melalui keputusan yang dihasilkannya harus mampu mengikat berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan.
4. Bersifat demokratis, yakni setiap pihak harus didengarkan dan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan diambil.

Tanpa adanya keempat hal di atas, maka konflik yang terjadi di antara berbagai kekuatan sosial akan menyelinap ke bawah permukaan, yang pada saatnya dapat meledak ke dalam bentuk kekerasan. Namun demikian, konsiliasi dapat diselenggarakan secara baik apabila kelompok-kelompok yang bertikai memiliki tiga prasyarat sebagai berikut:

1. Menyadari akan adanya situasi konflik, melaksanakan prinsip keadilan dan kejujuran bagi semua pihak.
2. Kelompok-kelompok yang bertikai harus terorganisir secara jelas. Sejahtera kekuatan-kekuatan sosial tidak terorganisir, maka pengendalian konflik

pun akan sulit dilakukan, misalnya adanya aksi gerakan massa, amuk massa, dan lain-lain. Sebaliknya, konflik yang terjadi di antara kelompok yang terorganisir akan lebih mudah melembaga sehingga akan lebih mudah dikendalikan.

3. Setiap kelompok yang bertikai harus taat pada aturan main, serta menghindarkan diri dari munculnya pihak ketiga yang akan merugikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri.

Pengendalian dengan cara mediasi atau dengan perantara dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang dapat memberi "nasihat-nasihat" berkaitan dengan penyelesaian yang terbaik terhadap pertentangan yang mereka alami. Sekalipun nasihat dari pihak ketiga tidak bersifat mengikat terhadap yang terlibat konflik, namun cara pengendalian ini dirasa efektif karena memberikan kemungkinan pihak-pihak yang bertentangan untuk menarik diri tanpa harus kehilangan muka, mengurangi pemborosan, dan lain sebagainya.

Pengendalian konflik dengan cara perwasitan atau arbitrase, dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara ini mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit.

Lebih jelas lagi Jack Rothman (Sihbudi dan Nurhasim, 2003:35) menyatakan bahwa untuk mengatasi konflik di dalam masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu: (1) Tindakan koersif (paksaan), perlu ada pengaturan administratif, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi; (2) Memberikan insentif seperti memberikan penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan keharmonisan; (3) Tindakan persuasif, terutama terhadap ketidakpuasan realitas sosial yang dihadapi masyarakat; (4) Tindakan normatif, yakni melakukan proses membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai.

Selanjutnya untuk mengatasi konflik vertikal perlu dibangun suatu rekonsiliasi atau penyelesaian politik yang menguntungkan masyarakat luas.

Karena bagi kalangan elite, konflik dijadikan sebagai sarana untuk tawar-menawar atau untuk melakukan penekanan demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar,
 - c. Menyimpulkan
 - d. Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
 - a. Mendiskusikan materi pelatihan
 - b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
 - c. Melaksanakan refleksi

E. LATIHAN/TUGAS

Identifikasikan berbagai macam konflik yang terjadi di Indonesia, baik konflik horisontal maupun konflik vertikal, kemudian analisislah mengenai sentimen utama dalam mobilisasi konflik!

NO	KEJADIAN KONFLIK (KERUSUHAN)		SENTIMEN UTAMA DALAM MOBILISASI KONFLIK			
	TEMPAT	WAKTU	AGAMA	SUKU	KELAS	POLITIK

1. Munculnya budaya kekerasan erta kaitannya dengan adanya kemiskinan atau kesenjangan ekonomi. Jelaskan kaitannya!
2. Budaya kekerasan bisa jadi muncul karena adanya proses penumpukan perasaan di kalangan insan Indonesia. Berikan masukan berkaitan dengan dunia pendidikan!
3. Dalam masyarakat kita seringkali muncul tindakan diskriminasi terhadap etnis tertentu, sebagai contoh diskriminasi etnis Tionghoa di Jawa. Mengapa hal itu bisa terjadi?
4. Setiap kali terjadi perhelatan politik seperti pemilu dan pilkada, acapkali pula terjadi kerusuhan akibat fanatisme yang berlebih dari para pendukung salah satu pihak. Berikan argumen mengapa hal itu dapat terjadi? Kaitkan dengan budaya dan karakteristik bangsa Indonesia!
5. Gejala menarik yang terjadi di negara kita adalah adanya satu birokrasi yang merupakan bagian dari organisasi sosial politik (parpol). Ketidaknetralan birokrasi dapat memancing ketegangan sosial yang memanifestasi pada tindakan-tindakan yang berdimensi SARA. Meskipun SARA adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia, tetapi SARA tetap tidak dapat dihindari. Analisalah kasus tersebut! Bagaimana menyikapinya?

F. RANGKUMAN

Sebagai gejala sosial, konflik akan selalu ada pada setiap masyarakat, karena antagonisme atau perbedaan menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat.

Fenomena konflik memang tak pernah lepas dari faktor ekonomi dan kekuasaan (politik). Teori konflik yang paling awal pun dibangun atas kerangka persoalan ekonomi. Adalah Karl Marx yang mencetuskan teori konflik, yang melihat bahwa kehidupan masyarakat selalu dalam kondisi konflik akibat perebutan sumber-sumber ekonomi yang semakin langka. Pandangan itu kemudian diikuti oleh ilmuwan lain seperti Georg Simmel, Dahrendorf, Lewis Coser, dan ilmuwan modern lainnya.

Ibn Khaldun, seorang teoretisi sosiologi abad XIV pun telah mengidentifikasi adanya konflik. Faktor yang menentukan terjadinya konflik menurutnya adalah watak manusia, faktor ekonomi, dan faktor politik.

Terjadinya konflik sosial dapat didekati melalui beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan politik suatu daerah mempunyai potensi bagi terjadinya ketegangan sosial maupun konflik, baik dalam katagori lunak maupun keras seperti kerusuhan.
2. Perimbangan kekuatan-kekuatan sosial seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang hampir sama dianggap sebagai akar utama penyebab terjadinya kerusuhan.
3. Daerah dengan perimbangan antara penduduk asli dan pendatang yang timpang dilihat dari penguasaan aset ekonomi maupun politik, akan memungkinkan timbulnya konflik dan kerusuhan.
4. Pola pemukiman penduduk yang heterogen atau multietnik dianggap dapat menjadi sumber konflik atau ketegangan sosial.

Kerusuhan sosial tidak akan terjadi apabila tidak didahului oleh faktor-faktor akselerator maupun pemicu yang saling terkait, meskipun di suatu daerah sudah ada sumber masalah.

Berdasarkan akar masalahnya, berbagai konflik yang terjadi menyaru ke dalam bentuk konflik ekonomi, konflik agama, konflik ideologi, konflik politik, konflik suku atau rasial, konflik perebutan sumber daya alam, maupun

konflik lingkungan. Namun dalam kenyataannya konflik tidak selalu berdiri sendiri berdasarkan akar masalahnya. Konflik dapat berdimensi luas yang berakar dari berbagai sumber.

Alternatif pemecahan konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, konflik horisontal biasanya mengedepankan penyelesaian dengan jalan damai melalui kompromi, mediasi, maupun arbitrase. Sedangkan konflik vertikal memerlukan bangunan rekonsiliasi yang berpihak pada rakyat.

G. UMPAN BALIK

Setelah membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini apakah Anda memperoleh pengetahuan baru, yang sebelumnya belum pernah Anda pahami, apakah materi yang diuraikan mempunyai manfaat dalam mengembangkan materi sosiologi, khususnya masalah sosial? Setelah Anda membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini rencana tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

KEKERASAN SOSIAL

A. TUJUAN

Setelah mempelajari materi modul Kekerasan Sosial peserta diklat diharapkan mampu:

1. Membedakan konsep kekerasan sosial dengan benar
2. Menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan sosial dengan benar
3. Mengurai masalah kekerasan sebagai fenomena sosial dengan benar

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Indikator pencapaian kompetensi dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep kekerasan sosial
2. Menjelaskan tipologi kekerasan sosial
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong tindak kekerasan sosial

C. URAIAN MATERI

1. Konsep Kekerasan Sosial

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin 'violentus', yang berarti keganasan, kebengisan, kadahsyatan, kegarangan, aniaya, dan pemerkosaan (Fromm, 2000). Tindak kekerasan, menunjuk kepada tindakan yang dapat merugikan orang lain, misalnya: pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain.

Soerjono Soekanto (2002: 98), mengartikan kekerasan (*violence*) sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Selain penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, kekerasan juga bisa berupa ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Narwoko dan Suyanto, 2000: 70). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa tindak kekerasan merupakan perilaku sengaja maupun tidak sengaja yang ditunjukkan untuk merusak orang atau

kelompok lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak pada kerusakan hingga trauma psikologis bagi korban.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak kekerasan seolah-olah telah melekat dalam diri seseorang guna mencapai tujuan hidupnya. Tidak mengherankan, jika semakin hari kekerasan semakin meningkat dalam berbagai macam dan bentuk. Galtung (1996: 203) mencoba menjawab dengan membagi tipologi kekerasan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. **Kekerasan Langsung.** Kekerasan langsung biasanya berupa kekerasan fisik, disebut juga sebagai sebuah peristiwa (*event*) dari terjadinya kekerasan. Kekerasan langsung terwujud dalam perilaku, misalnya: pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan langsung merupakan tanggungjawab individu, dalam arti individu yang melakukan tindak kekerasan akan mendapat hukuman menurut ketentuan hukum pidana.
- b. **Kekerasan Struktural (kekerasan yang melembaga).** Disebut juga sebuah proses dari terjadinya kekerasan. Kekerasan struktural terwujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya: diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan struktural merupakan bentuk tanggungjawab negara, dimana tanggungjawab adalah mengimplementasikan ketentuan konvensi melalui upaya merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan administrasi, melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan. Muaranya ada pada sistem hukum pidana yang berlaku.
- c. **Kekerasan Kultural.** Kekerasan kultural merupakan suatu bentuk kekerasan permanen. Terwujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya: kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleranan, aspek-aspek budaya, ranah simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, serta ilmu pengetahuan.

Beberapa ahli menyebut tipe kekerasan seperti ini sebagai kekerasan psikologis.

Dalam pandangan Bourdieu (Martono, 2009) kekerasan struktural dan kultural dapat dikategorikan sebagai **kekerasan simbolik**. Kekerasan simbolik adalah mekanisme komunikasi yang ditandai dengan relasi kekuasaan yang timpang dan hegemonik di mana pihak yang satu memandang diri lebih superior entah dari segi moral, ras, etnis, agama ataupun jenis kelamin dan usia. Tiap tindak kekerasan pada dasarnya mengandaikan hubungan dan atau komunikasi yang sewenang-wenang di antara dua pihak. Dalam hal kekerasan simbolik hubungan tersebut berkaitan dengan pencitraan pihak lain yang bias, monopoli makna, dan pemaksaan makna entah secara tekstual, visual, warna Contoh, julukan "kafir" untuk menyebut agama yang berbeda dengan kelompok yang dianutnya, sebutan "hitam" bagi kelompok kulit hitam, sebutan "bodoh" bagi siswa, dan sebutan "miskin" untuk menunjuk orang tidak mampu secara ekonomi, dan seterusnya.

Jika dilihat berdasarkan pelakunya, kekerasan juga dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu: kekerasan individual dan kekerasan kolektif. **Kekerasan individual**, adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu. Contoh: pencurian, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain. Sedangkan **kekerasan kolektif**, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Contoh: tawuran pelajar, bentrokan antar desa. Kekerasan kolektif dapat disebabkan oleh larutnya individu dalam kerumunan, sehingga seseorang menjadi tidak lagi memiliki kesadaran individual atau hilang rasionalitas. Kerusuhan sepak bola mungkin contoh yang tepat untuk kekerasan yang satu ini. Selain juga "penghakiman massa" terhadap pencuri atau pelaku kejahatan jalanan.

Klasifikasi lain dikemukakan oleh Sejiwa (2008: 20), yang membagi bentuk kekerasan ke dalam dua jenis, yaitu: kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. **Kekerasan fisik** yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dan

sebagainya. Sedangkan **kekerasan non fisik** yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.

Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikis. Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contoh: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebarkan gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum dengan lisan, dan lain-lain. Sementara itu kekerasan psikologis/psikis merupakan kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contoh: memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir dan memelototi.

3. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan

Banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat menimbulkan rasa keprihatinan yang mendalam dalam diri anggota masyarakat. Setiap kekerasan yang terjadi, tidak sekedar muncul begitu saja tanpa sebab-sebab yang mendorongnya. Oleh karena itu, para ahli sosial berusaha mencari penyebab terjadinya kekerasan dalam rangka menemukan solusi tepat mengurangi kekerasan.

Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam diri manusia. Dia percaya bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, serta benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar dan berpikiran pendek. Hobbes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, kekerasan adalah sifat alami manusia. Dalam ketatanegaraan, sikap kekerasan digunakan untuk menjadikan warga takut dan tunduk kepada pemerintah. Bahkan Hobbes berprinsip bahwa hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan memiliki kekuatanlah yang dapat mengedalikan situasi dan kondisi bangsa.

Sedangkan J. J. Rousseau mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu polos, mencintai diri secara spontan, serta tidak egois. Peradaban serta kebudayaanlah yang menjadikan manusia kehilangan sifat

aslinya. Manusia menjadi kasar dan kejam terhadap orang lain. Dengan kata lain kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.

Terlepas dari kedua tokoh tersebut, ada beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya kekerasan, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Individual

Beberapa ahli berpendapat bahwa setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilaku individu. Faktor penyebab dari perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi meliputi kelainan jiwa. Faktor yang bersifat sosial antara lain konflik rumah tangga, faktor budaya dan faktor media massa.

b. Faktor Kelompok

Individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama atau etnik. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan.

c. Faktor Dinamika Kelompok

Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat tidak mampu ditanggap dengan seimbang oleh sistem sosial dan masyarakatnya. Dalam konteks ini munculnya kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
- 2) Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.
- 3) Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.

- 4) Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasi diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
- 5) Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan.

4. Penutup

Tindakan kekerasan akan berdampak negatif seperti kerugian baik material maupun nonmaterial. Menghentikan kekerasan tentu tidak dapat dilakukan hanya oleh beberapa pihak. Pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dalam negara memang selayaknya menjadi pemimpin dalam upaya menghentikan kekerasan. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan solusi untuk sebuah permasalahan, tetapi menciptakan permasalahan baru. Pemerintah juga perlu memberikan contoh dan bukti nyata bahwa kekerasan tidak layak untuk dilakukan di sebuah negara merdeka dan demokratis. Di sisi lain, masyarakat juga harus melakukan fungsi pencegahan untuk lebih peduli terhadap ketenteraman lingkungan menuju kehidupan sosial yang damai dan harmonis.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Buatlah kelompok kerja, 3-4 kelompok dengan anggota 4-5 orang. Diskusikan dalam kelompok tentang bentuk-bentuk kekerasan sosial.

Cari tema atau fenomena di masyarakat yang berhubungan dengan kekerasan kemudian diskusikan untuk mencari solusi permasalahannya.

E. TUGAS : Dikerjakan dalam kelompok

F. RANGKUMAN

1. Soerjono Soekanto (2002: 98), mengartikan kekerasan (*violence*) sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Selain penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, kekerasan juga bisa berupa ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Narwoko dan Suyanto, 2000: 70).

2. **Tipe-Tipe Kekerasan**, Galtung (1996: 203) mencoba menjawab dengan membagi tipologi kekerasan menjadi 3 (tiga), yaitu: **Kekerasan Langsung**. Kekerasan langsung biasanya berupa kekerasan fisik, **Kekerasan Struktural**, terwujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya: diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural merupakan suatu bentuk kekerasan permanen. Terwujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya: kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleranan, aspek-aspek budaya, ranah simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, serta ilmu pengetahuan.
3. Dalam pandangan Bourdieu (2005) kekerasan struktural dan kultural dapat dikategorikan sebagai **kekerasan simbolik**. Kekerasan simbolik adalah mekanisme komunikasi yang ditandai dengan relasi kekuasaan yang timpang dan hegemonik di mana pihak yang satu memandang diri lebih superior entah dari segi moral, ras, etnis, agama ataupun jenis kelamin dan usia.
4. Jika dilihat berdasarkan pelakunya, kekerasan juga dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu: kekerasan individual dan kekerasan kolektif. **Kekerasan individual**, adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu. Contoh: pencurian, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain. Sedangkan **kekerasan kolektif**, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Contoh: tawuran pelajar, bentrokan antar desa.
5. Beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya kekerasan, yaitu sebagai berikut :faktor individual, faktor kelompok, dan faktor dinamika kelompok Dalam konteks ini munculnya kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :
 - a. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
 - b. Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.

- c. Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.
- d. Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasi diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
- e. Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

1. Berdasarkan hasil resume, buatlah korelasi kajian kekerasan sosial di atas dengan fenomena-fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat kita.
2. Apabila Anda sudah berhasil dalam melakukan kaitan antara konsep-konsep dalam bahan ajar ini terhadap permasalahan di sekitar kehidupan masyarakat, maka cobalah diskusikan kembali dengan teman anda
3. Buat media-media pembelajaran agar hasil yang Anda pelajari dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah.

Kegiatan Pembelajaran 3

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

A. Tujuan

Dengan mendengarkan, diskusi, dan mengerjakan tugas, guru mampu mengidentifikasi jenis-jenis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
2. Menjelaskan tujuan PKB
3. Menjelaskan manfaat PKB
4. Menjelaskan jenis-jenis PKB
5. Menjelaskan prinsip-prinsip PKB

C. Uraian Materi

1. Pendahuluan

Keputusan yang tertuang dalam Permennegran dan Reformasi Nomor 16 Tahun 2009 memberi panduan untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), keputusan ini telah mengalami perkembangan dengan adanya regularisasi keputusan pada tahun-tahun berikutnya dimasa mendatang, seperti Permendiknas no 35 tahun 2010 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.; kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru. Semua peraturan disediakan dalam rangka mewujudkan tenaga pendidik yang professional.

Dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dapat dilakukan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Dari ketiga kegiatan tersebut, kegiatan publikasi ilmiah, nilai angka kredit yang besar. permasalahan yang dialami guru sampai saat ini adalah penulisan laporan hasil penelitian.

Penelitian yang dapat dilakukan guru secara terus menerus adalah dengan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pada kegiatan diklat ini, peserta akan melaksanakan penyusunan proposal PTK sehingga mempunyai ketrampilan melaksanakan penelitian tindakan kelas dan membuat laporan hasil PTK.

2. Konsep Dasar PKB

a. Pengertian PKB

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. PKB merupakan salah satu komponen pada unsure utama yang kegiatannya diberikan angka kredit.

PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa guru pada perubahan yang diinginkan, yaitu pengembangan profesinya. Muara akhir yang diharapkan sebenarnya berkaitan dengan keberhasilan siswa. Guru-guru yang melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) akan membawa pembelajarannya untuk menjadikan siswa-siswanya dapat mempunyai pengetahuan dan keterampilan lebih baik, serta menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya.

Penilaian Kinerja Berkelanjutan dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil PKB Guru dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil Penilaian Kinerja Guru masih berada di bawah standar kompetensi yang ditetapkan atau berkinerja rendah, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang diorientasikan sebagai pembinaan untuk mencapai kompetensi standar yang disyaratkan. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi yang disyaratkan, maka kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diarahkan kepada pengembangan kompetensi agar dapat memenuhi tuntutan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan

kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik.

3. Tujuan PKB

Secara umum, keberadaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah yang berimbas pada peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan disajikan berikut ini.

- a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.
- b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa mendatang.
- c. Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
- d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
- e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah semua guru pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan/atau Kementerian lain, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

5. Manfaat PKB

Manfaat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi peserta didik yaitu memperoleh jaminan kepastian mendapatkan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal, sehingga mereka memiliki kepribadian kuat dan berbudi pekerti luhur untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bagi guru hal ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta

memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya; sehingga selama karirnya mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik menghadapi kehidupan di masa datang.

Dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk guru, bagi sekolah/madrasah diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi pembelajaran yang efektif; sehingga sekolah/madrasah dapat menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi, dedikasi, dan komitmen guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Bagi orang tua/masyarakat, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk guru bermakna memiliki jaminan bahwa anak mereka di sekolah akan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Bagi pemerintah, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk guru dimungkinkan dapat memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam menunjang pembangunan pendidikan; sehingga pemerintah dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kompetitif dan berkepribadian luhur

6. Jenis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mencakup ketiga unsur tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak sekedar

untuk pemenuhan angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru diasumsikan telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional tertentu, guru tetap wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan .

Jenis kegiatan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai berikut :

a. Pengembangan diri

- 1) Diklat fungsional bagi guru.
- 2) Kegiatan kolektif guru:
 - a) Lokakarya atau kegiatan kelompok/musyawarah kerja guru atau *in house training* untuk menyusun perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan penilaian pembelajaran, pengembangan media pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru.
 - b) Mengikuti, baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta, pada seminar, koloqium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya.
 - c) Mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya.

b. Publikasi Ilmiah pada kegiatan PKB

- 1) presentasi pada forum ilmiah
 - 2) publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal
- Publikasi Ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal
- 1) Laporan hasil penelitian
 - a). Laporan hasil penelitian yang berupa terbitan/ dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan telah mendapatkan pengakuan BSNP
 - b). Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan/ dipublikasikan dalam majalah ilmiah/ jurnal ilmiah diedarkan secara nasional dan terakreditasi

- c). Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan/ dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi.
- d) Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan/ dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat kabupaten/kota.
- e). Laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah/ madrasahnyanya dan disimpan di perpustakaan.

2) Tinjauan ilmiah

Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi ide/gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dalam pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya (disekolah/madrasah)

3) Tulisan ilmiah populer

Karya ilmiah populer adalah tulisan yang dipublikasikan di media massa (Koran, majala, atau sejenisnya), merupakan kelompok tulisan yang lebih banyak mengandung isi pengetahuan, berupa ide, atau gagasan pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan penulis bersangkutan

4) Artikel ilmiah

Artikel ilmiah dibidang pendidikan adalah tulisan yang berisi gagasan atautinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah.

Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru.

- 1) buku pelajaran
- 2) modul/Diklat pembelajaran
- 3) buku dalam bidang pendidikan
- 4) karya terjemahaan
- 5) buku pedoman guru.

c. Karya Inovatif

- 1) Menemukan teknologi tepat guna, karya teknologi tepat guna yang selanjutnya disebut karya sains/teknologi adalah karya hasil rancangan/pengembangan/percobaan dalam bidang sains dan/atau

teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancarnya atau masyarakat terbantu kehidupannya.

- 2) Menemukan atau menciptakan karya seni, proses perrefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetika dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberikan makna transendental baik spiritual maupun intelektual bagi manusia atau kemanusiaan.
- 3) Membuat atau memodifikasi alat pelajaran yaitu adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran/bimbingan pada khususnya dan proses pendidikan di sekolah/madrasah pada umumnya.
- 4) Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal sejenisnya. Kegiatan penyusunan standar/pedoman/soal yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau provinsi.

7. Prinsip-prinsip PKB

Agar pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan prioritas pelaksanaan tersebut, maka pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari yang berorientasi kepada keberhasilan peserta didik. Cakupan materi untuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus kaya dengan materi akademik, metode pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, teknologi dan/atau seni, serta berbasis pada data dan hasil pekerjaan peserta didik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- b. Setiap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya.
- c. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan

minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau sekolah berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, maka proses perencanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dimulai dari sekolah.

- d. Guru yang tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru, jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- e. Guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai salah satu sumber informasi kegiatan monitoring dan evaluasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.
- f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan/atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan sekolah dan/atau kabupaten/kota dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan.
- g. Sedapat mungkin kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan di sekolah atau KKG/MGMP/MGBK bersama-sama dengan sekolah lain, sehingga mengurangi dampak negatif pada layanan pendidikan karena guru meninggalkan sekolah.
- h. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mewujudkan guru yang lebih profesional sehingga mendorong pengakuan profesi guru sebagai lapangan pekerjaan yang bermartabat dan bermakna bagi masyarakat dalam pencerdasan kehidupan bangsa.

- i. Pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pengembangan karir guru yang lebih objektif, transparan dan akuntabel

Tabel 1. Persyaratan Angka Kredit Minimal bagi Guru yang akan Naik Pangkat/Jabatan Subunsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berdasarkan Golongan dan Jabatan

Dari Jabatan	Ke Jabatan	Jumlah angka kredit minimal dari subunsur		
		Subunsur pengembangan diri	Subunsur publikasi ilmiah dan atau karya Inovatif	Macam publikasi ilmiah yang wajib ada (minimal satu publikasi)
Guru Pertama golongan III/a	Guru Pertama golongan III/b	3 (tiga)	--	-
Guru Pertama golongan III/b	Guru Muda golongan III/c	3 (tiga)	4 (empat)	Bebas pada jenis karya publikasi ilmiah dan inovatif
Guru Muda golongan III/c	Guru Muda golongan III/d	3 (tiga)	6 (enam)	Bebas pada jenis karya publikasi ilmiah dan inovatif
Guru Muda golongan III/d	Guru Madya golongan IV/a	4 (empat)	8 (delapan)	Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e)
Guru Madya golongan IV/a	Guru Madya golongan IV/b	4 (empat)	12 (dua belas)	Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e) dan Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.b, 2.2.c atau 2.2.d)
Guru Madya golongan IV/b	Guru Madya golongan IV/c	4 (empat)	12 (dua belas)	Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e) dan Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.b, atau 2.2.c), atau 2.2.h.1 atau 2.2.h.2)
Guru Madya golongan IV/c	Guru Utama golongan IV/d	5 (lima)	14 (empat belas)	Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e) dan Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.b atau 2.2.c atau 2.2.h.1) dan Buku pelajaran atau buku pendidikan (2.3.a.1, atau 2.3.a.2, atau 2.3.c.1)
Guru Utama golongan IV/d	Guru Utama golongan IV/e	5 (lima)	20 (dua puluh)	Makalah hasil penelitian (kode 2.2.e) dan Artikel yang dimuat di jurnal (2.2.a, atau, 2.2.b, atau 2.2.h.1) dan Buku pelajaran atau buku pendidikan (2.3.a.1 atau 2.3.a.2, atau 2.3.c.1)

Keterangan:

Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang
2.2.b = pendidikan di sekolah/madrasah nya, diterbitkan/ dipublikasikan
dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi.

Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang
2.2.c = pendidikan di sekolah/madrasah nya, diterbitkan/ dipublikasikan
dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi.

Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang
2.2.d = pendidikan di sekolah/madrasah nya, diterbitkan/ dipublikasikan
dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/ kota.

Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang
2.2.e = pendidikan di sekolah/madrasah nya, diseminarkan di
sekolah/madrasah nya, disimpan di perpustakaan.

Membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan
2.2.h.1 = pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat
nasional yang terakreditasi.

Membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan
2.2.h.2 = pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat
nasional yang tidak terakreditasi/tingkat provinsi.

2.3.a.1 = Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP.

2.3.a.2 = Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN.

2.3.c.1 = Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN.

Khusus Untuk kenaikan pangkat/golongan mulai III/d ke atas :

Jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan
ilmiah populer paling banyak 3 (tiga) buah. dan buku pedoman guru paling
banyak 1 (satu) buah.

Untuk penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun.

Untuk karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan

3. Kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan misalnya sebagai kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala perpustakaan, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dsb.
4. Peningkatan kompetensi yang diminati oleh guru untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan karirnya.

Pencapaian dan peningkatan kompetensi tersebut pada akhirnya bukan hanya bertujuan untuk peningkatan keprofesian guru dalam menunjang layanan pendidikan yang bermutu, tetapi juga berimplikasi peningkatan kemampuan melaksanakan tugas utamanya dalam pembelajaran/pembimbingan serta perolehan angka kredit untuk pengembangan karir guru.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Memperhatikan penjelasan fasilitator
2. Memperhatikan petunjuk kegiatan di modul
3. Pelajari *hand out* dengan seksama.
4. Mengerjakan latihan/Kasus/Tugas

E. Latihan/ Kasus /Tugas

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan oleh guru dapat dilakukan melalui kegiatan apa saja?
2. Jelaskan pengertian PKB
3. Jelaskan tujuan PKB.
4. Jelaskan prinsip-prinsip PKB
5. Perhatikan skema di bawah ini. Jelaskan siklus Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru sesuai siklus.



F. Rangkuman

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guru dapat dilakukan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif
2. Pengertian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesionalitasnya. PKB merupakan salah satu komponen pada unsure utama yang kegiatannya diberikan angka kredit.
3. Tujuan PKB adalah :
 - a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.
 - b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa mendatang.

- c. Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
- d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
- e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.

4. Prinsip-prinsip PKB :

- a. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari yang berorientasi kepada keberhasilan peserta didik.
- b. Setiap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya.
- c. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
- d. Guru yang tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai salah satu sumber informasi kegiatan monitoring dan evaluasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan/atau kabupaten/kota.
- g. Sedapat mungkin kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan di sekolah atau KKG/MGMP/MGBK bersama-sama dengan sekolah lain, sehingga mengurangi dampak negatif pada layanan pendidikan karena guru meninggalkan sekolah.

- h. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mewujudkan guru yang lebih profesional.
- i. Pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pengembangan karir guru yang lebih objektif, transparan dan akuntabel

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Tulislah materi yang telah dipelajari dari bahan di atas, secara esensialnya.
2. Setelah mempelajari materi PKB, ingin mempelajari materi yang berhubungan dengan PKB tentang apa lagi?

H. Kunci Jawaban

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dapat dilakukan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif
2. Pengertian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesionalitasnya. PKB merupakan salah satu komponen pada unsure utama yang kegiatannya diberikan angka kredit.
3. Tujuan PKB adalah :
 - a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.
 - b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa mendatang.
 - c. Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
 - d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
 - e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.

4. Prinsip-prinsip PKB :

- a. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari yang berorientasi kepada keberhasilan peserta didik.
- b. Setiap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya.
- c. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
- d. Guru yang tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai salah satu sumber informasi kegiatan monitoring dan evaluasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan/atau kabupaten/kota.
- g. Sedapat mungkin kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan di sekolah atau KKG/MGMP/MGBK bersama-sama dengan sekolah lain, sehingga mengurangi dampak negatif pada layanan pendidikan karena guru meninggalkan sekolah.
- h. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mewujudkan guru yang lebih profesional.
- i. Pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pengembangan karir guru yang lebih objektif, transparan dan akuntabel

5. Berdasarkan siklus Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dapat dijelaskan bahwa guru profesional akan melakukan evaluasi diri setiap

awal tahun. Hasil evaluasi diri memberikan informasi mengenai kelemahan-kelemahan yang harus ditingkatkan dan diperbaiki dalam kinerjanya. Perbaikan yang dilakukan itu dalam administrasi sesuai dengan tuntutan pengembangan profesi, yang merupakan hasil kinerjanya untuk dilaporkan dan dijadikan bahan penilaian kinerja guru pada akhir tahun. Bahan kinerja yang mendapatkan persetujuan sebagai angka kredit jabatan guru, jika telah mencukupi jumlahnya akan menjadi bahan pengembangan karir dan menaikkan pangkat serta jabatan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendiknas, Dit. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, 2011. *Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)*
- ,-----, 2011, *Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)*
- ,-----, 2011, *Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)*
- ,-----, 2011 *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya.*
- ,-----, 2011 *Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru.*

Google, http://bp.blogspot.com/-A_W55d-sjTg , tanggal 3 September 2015

Glosarium

1. KKG/MGMP/MGBK



PPPPTK Pkn DAN IPS

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id